

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal guna mendukung pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan aset publik berbasis budaya yang mampu menunjang sektor pariwisata desa. (Puspitarini & Maulana 2021). Museum budaya menjadi sarana penting tidak hanya sebagai tempat pelestarian nilai sejarah dan identitas lokal, tetapi juga sebagai daya tarik wisata yang mampu menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pengembangan museum tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan bangunan fisik, melainkan juga mencakup aspek pengelolaan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat dalam membangun destinasi wisata desa yang berkelanjutan. Menurut (Safira, Amalia, & Wicaksono 2024) dinamika pengembangan museum budaya menjadi isu penting dalam upaya mengintegrasikan pelestarian budaya dengan penguatan pariwisata dan pembangunan desa.

Sesuai pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa aset desa merupakan seluruh kekayaan milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Aset tersebut mencakup aset fisik seperti tanah, bangunan, jalan, fasilitas umum, serta aset nonfisik berupa hak pengelolaan, izin, dan warisan budaya. Dalam lingkup desa, aset publik meliputi tanah kas desa, balai desa, pasar tradisional, fasilitas pendidikan, sumber air, hingga ruang terbuka hijau. (Yonnawati & Male 2017). Aset publik memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya sehingga pengelolaannya tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekologi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat identitas lokal. Sebagai komponen utama dalam pembangunan daerah, aset publik harus

dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar dapat nilai tambah bagi pembangunan desa, termasuk ketika aset tersebut dikembangkan menjadi museum budaya sebagai penunjang pariwisata desa. (Suyoto 2023).

Aset desa atau aset publik juga memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Aset- aset ini menjadi sumber daya utama bagi pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan program-program pembagunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, pemanfaatan aset publik di tingkat desa pada kenyataanya belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih dijumpai dalam proses pengelolaannya. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pendataan aset yang belum tertata dengan baik. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan serta keterbatasan kapasitas pengelolaan di tingkat desa juga turut mempengaruhi efektivitas pemanfaataan aset publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa tidak hanya membutuhkan ketersediaan fisik, tetapi juga sistem administrasi dan manajerial yang baik. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan perbaikan dalam tata Kelola aset, mulai dari pencatatan yang terstruktur, pengawasan yang berkelanjutan, hingga keterlibatan masyarakat agar pemanfaatan aset desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa, termasuk ketika aset tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya(Setiya, Raharjo, & Yudanto 2024).

Aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung proses pembangunan di tingkat desa. Aset tersebut meliputi berbagai kekayaan yang dimiliki desa, seperti tanah kas desa, bangunan, sumber daya alam, serta beragam fasilitas publik. Fasilitas publik antara lain, balai desa, pasar tradisional, taman maupun museum menjadi bagian dari aset desa yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dikelola dengan baik, fasilitas publik tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kalitas hidup warga serta memperkuat identitas dan karakter lokal desa. Keberadaan fasilitas publik tidak hanya menjadi penunjang kegiatan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan desa yang berorientasi

pada kesejahteraan masyarakat (Khozanatu Lahpan et al. 2024). Namun, (Akib, Afina, & Devi 2024) menjelaskan bahwa pengelolaan fasilitas publik sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterbatasan dana untuk pemeliharaan fasilitas tersebut, sehingga banyak fasilitas publik yang mengalami penurunan kualitas atau bahkan tidak dapat digunakan. Selain itu, kurangnya kapasitas manajerial dan perencanaan yang matang sering kali menyebabkan fasilitas publik tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fasilitas publik merupakan bagian tak terpisahkan dari infrastruktur sosial yang dibangun oleh negara atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Fasilitas ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, hingga ruang terbuka hijau yang fungsinya tidak hanya sebatas melayani kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, historis, dan ekologis (Bastian Ahmadan et al. 2025). Dalam konteks pedesaan, fasilitas publik seperti balai desa, lapangan olahraga, pasar tradisional, taman, dan museum desa menjadi simpul penting dalam aktivitas sosial dan pembangunan berbasis komunitas. Namun, dalam era modernisasai, peningkatan kebutuhan infrastruktur, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pola ruang telah mendorong fenomena alih fungsi fasilitas publik, baik secara legal maupun informal. Alih fungsi adalah proses perubahan penggunaan suatu fasilitas dari tujuan awalnya menjadi fungsi lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini atau lebih menguntungkan dari segi ekonomi (Bagus Brata & Dewi Sartika 2024). Di satu sisi, alih fungsi memang dapat menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan jangka pendek desa, seperti peningkatan pendapatan asli desa (PADes), penyediaan ruang usaha, atau pembangunan infrastruktur strategis. Alih fungsi fasilitas publik mencerminkan adanya tantangan yang cukup besar dalam sistem tata kelola pemerintahan desa, terutama yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pengelolaan aset desa secara berkelanjutan.

Dalam konteks hukum dan peraturan, pengelolaan aset desa sudah memiliki dasar dan landasan yang jelas. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa aset desa harus dikelola secara terbuka, dapat

dipertanggungjawabkan, dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga harus menjamin manfaat nyata bagi warga desa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa aset desa meliputi kekayaan milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, bantuan pemerintah, hibah, dan kekayaan lainnya yang sah. Aset desa, termasuk fasilitas publik, hanya dapat dialihfungsiikan atau dialihkan status penggunaannya melalui mekanisme yang ketat, termasuk persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pencatatan dalam sistem informasi keuangan desa(Harpinsky & Maryanti 2023).

Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pasal 20 hingga Pasal 25 tentang Pengelolaan Aset Desa memberikan pedoman teknis yang komprehensif bagi pemerintah desa dalam mengelola, memanfaatkan, dan mempertanggung jawabkan aset desa, termasuk fasilitas publik (Lestari, Falah, & Muslimin 2023). Pada Pasal 20 hingga Pasal 25, dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pemindahtanganan (perubahan status kepemilikan) dan pemanfaatan aset desa. Ketentuan ini mencakup mekanisme penyewaan, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah (*Build Operate Transfer*), bangun serah guna (*Build Transfer Operate*), dan bentuk-bentuk lain yang memungkinkan aset desa dimanfaatkan secara produktif tanpa kehilangan hak kepemilikannya (Noviawati & Galih 2019). Esensi dari ketentuan tersebut adalah memastikan bahwa setiap perubahan pemanfaatan aset desa dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada kepentingan bersama Masyarakat. Aset desa, termasuk fasilitas publik seperti tanah lapang, gedung serbaguna, maupun museum desa, tidak dapat dialihfungsiikan atau dimanfaatkan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Dalam hal ini kepala desa tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil Keputusan secara sepahak. Sebagaimana dijelaskan oleh (Utami ningsih 2024), proses alih fungsi aset desa harus memperoleh persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta didukung oleh kajian yang memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Selain berfungsi sebagai sarana pelayanan, pemanfaatan aset desa juga seharusnya mampu memberikan nilai tambah bagi desa, baik berupa peningkatan pendapatan asli desa (PADes) maupun perbaikan kesejahteraan sosial Masyarakat. Setiap bentuk kerja sama atau perubahan pemanfaatan aset perlu dilengkapi dengan perjanjian tertulis, batas waktu yang jelas, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban hukum yang kuat agar aset desa tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan. Apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, desa berisiko mengalami kerugian dalam jangka Panjang, seperti hilangnya kendali aset desa strategis, menurunnya nilai budaya, serta berkurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menjadi penting sebagai dasar hukum dalam menjaga kepentingan publik, melindungi aset desa sebagai milik bersama, serta memastikan bahwa Pembangunan desa berlangsung secara adil berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.

Di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan, tidak jarang ditemui adanya perubahan fungsi aset desa yang terjadi karena dinamika sosial dan kebutuhan pembangunan. Salah satu bentuknya adalah alih fungsi fasilitas publik yang sebelumnya tidak lagi digunakan secara optimal. Hal ini sering dianggap sebagai strategi adaptif pemerintah desa untuk menghindari pemborosan aset dan menyesuaikan fungsi aset dengan kebutuhan masyarakat saat ini (Suwoto et al. 2023). Namun, alih fungsi semacam ini harus tetap mengedepankan prinsip kemanfaatan publik, kepatuhan pada aturan hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Bila dilakukan secara sepahak atau tanpa kajian mendalam, kebijakan alih fungsi bisa menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya nilai sejarah, berkurangnya ruang publik, hingga konflik sosial antara pemerintah desa dan warga.

Salah satu bentuk pemanfaatan aset desa yang kreatif dan berbasis budaya lokal ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Di desa ini, terdapat sebuah bangunan bekas Sekolah Dasar (SD) yang sudah tidak lagi difungsikan sebagai institusi pendidikan formal akibat kekurangan jumlah murid dan penurunan angka usia sekolah dasar di wilayah tersebut. Melihat kondisi bangunan yang terbengkalai dan

mempertimbangkan nilai historisnya bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa Bedingin kemudian mengambil inisiatif untuk merevitalisasi aset tersebut menjadi Museum, sebuah fasilitas publik yang berfungsi sebagai tempat pelestarian budaya, dokumentasi sejarah lokal, serta ruang edukasi masyarakat. Museum Marjaya didirikan sebagai ruang pelestarian budaya dan sejarah lokal, serta sebagai sarana edukasi dan potensi wisata berbasis kearifan lokal (Humaidy, Dewi, and Muftiadi 2022). Museum ini menyimpan berbagai koleksi tentang perjalanan sejarah desa, peninggalan masyarakat setempat, hingga arsip perjuangan lokal, yang menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Bedingin (Susetyo et al. 2025). Langkah ini pada awalnya mendapat respons positif karena dinilai sebagai wujud inovasi pemanfaatan aset desa yang produktif, berkelanjutan, dan relevan dengan identitas lokal. Museum Marjaya menjadi simbol kebanggaan warga serta menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan cerita perjuangan masyarakat desa. Selain itu, keberadaan museum tersebut turut berkontribusi dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal dan menghidupkan aktivitas sosial budaya masyarakat.

Selain itu, keberadaan Museum Marjaya justru berhasil memperkuat identitas budaya lokal, memperluas wawasan sejarah masyarakat, dan menjadi sarana edukatif bagi generasi muda di Desa Bedingin. Museum Marjaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah dan arsip desa, tetapi juga menjadi ruang aktivitas yang menghidupkan Kembali kesadaran kolektif Masyarakat terhadap nilai-nilai lokal. Dalam perkembangannya, museum ini mendorong keterlibatan warga melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, seperti pameran desa, pelatihan berbasis tradisi, serta program wisata edukatif yang melibatkan pelajar baik dari dalam maupun luar Desa Bedingin. Dengan mengedepankan kearifan lokal, Museum Marjaya tidak sekadar berperan sebagai sarana pelestarian sejarah, tetapi juga menjadi wadah munculnya kreativitas desa dalam memanfaatkan aset secara produktif tanpa mengabaikan fungsi sosialnya. Dengan demikian, keberadaan museum yang tetap pada jalurnya sebagai fasilitas publik justru membuktikan bahwa aset desa dapat menjadi instrumen pembangunan desa yang berkelanjutan, sepanjang

dikelola dengan visi yang kuat dan proses yang inklusif (Krisdayanthi, Pranatha Darma, & Meliana 2023).

Dalam pengelolaan Museum Marjaya ini kegagalan ataupun keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola aset-aset yang dimiliki, termasuk dalam menentukan arah pemanfaatannya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kebijakan, partisipasi aktif dari masyarakat, serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya desa. Keempat prinsip ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola aset desa bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga demi keberlanjutan dan kemaslahatan bersama (Wahyu Irawan & Bayakara 2023).

Dalam kasus Museum Marjaya, keputusan untuk mengembangkan fasilitas publik ini mencerminkan bagaimana pemerintah desa merespons perubahan kebutuhan masyarakat serta dinamika lokal yang terus berkembang. Jika proses alih fungsi tersebut dilakukan melalui musyawarah desa, melibatkan berbagai unsur masyarakat, mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan disusun dalam dokumen yang sah, maka hal ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi kebijakan yang sehat dan progresif (Putra & Hapsari 2020). Sebaliknya, apabila proses tersebut minim partisipasi, tidak transparan, atau tidak didasarkan pada kajian kebutuhan dan potensi desa, maka hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan desa dan berisiko menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, studi mengenai pengembangan Museum Marjaya menjadi penting untuk menggali sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa diimplementasikan dalam praktik pengelolaan aset desa. Penelitian ini tidak hanya akan menyoroti aspek administratif dan legal, tetapi juga melihat bagaimana partisipasi masyarakat diakomodasi, bagaimana pertanggungjawaban kebijakan dilakukan, dan bagaimana efektivitas pemanfaatan aset dijaga agar tetap berorientasi pada

kepentingan publik serta keberlanjutan jangka panjang (Sri Damayanti Wulandari & Astri Furqani 2022).

Dengan melihat pentingnya pemanfaatan aset desa secara optimal, pelestarian nilai sejarah, serta kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang edukatif dan produktif, diperlukan kajian mendalam mengenai dinamika pengembangan museum budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan dan pariwisata desa. Pengembangan museum tidak hanya berkaitan dengan perubahan fungsi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut sistem pengelolaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini menggunakan kerangka Teori Pengembangan Amartya Sen (1999) yang menekankan perluasan kapabilitas dan peran masyarakat, serta Teori Pembangunan Michael P. Todaro (1989) yang memandang pembangunan sebagai proses multidimensional melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan harga diri manusia, serta kebebasan dan partisipasi. Desa Bedingin dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki museum budaya yang berkembang dari pemanfaatan aset desa dan berpotensi menjadi penggerak pariwisata desa, namun belum banyak dikaji secara komprehensif dari sisi dinamika pengembangannya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Dinamika Pengembangan Museum Budaya Guna Menunjang Pariwisata Desa (Studi Kasus: Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)”, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merumuskan strategi pengelolaan museum budaya yang lebih efektif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika pengembangan museum budaya di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam menunjang pariwisata desa?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan museum budaya sebagai upaya meningkatkan pariwisata Desa Bedingin?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dinamika pengembangan museum budaya yang diterapkan di Desa Bedingin, termasuk latar belakang, proses, dan aktor yang terlibat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan museum budaya dalam meningkatkan pariwisata Desa Bedingin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan aset publik. Melalui analisis kebijakan alih fungsi fasilitas publik pada Museum Marjaya di Desa Bedingin, penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman mengenai pengelolaan aset desa, perumusan kebijakan berbasis lokal, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan pendekatan yang adaptif dan partisipatif dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan aset pada lingkungan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tidak hanya penting dalam tataran teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang dapat dirasakan langsung oleh berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan aset publik. Melalui studi kasus Museum Marjaya di Desa Bedingin, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran, kapabilitas, dan sinergi antara masyarakat, lembaga pemerintahan desa, serta institusi pendidikan tinggi. Adapun manfaat praktis secara lebih spesifik antara lain.

a. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya aset desa sebagai bagian dari hak bersama yang harus dijaga, dimanfaatkan secara optimal, dan dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Masyarakat juga diharapkan mampu menilai dan mengawasi kebijakan pemerintah desa secara kritis namun konstruktif, serta menjadi mitra aktif dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

b. Bagi Peneliti (Mahasiswa dan Akademisi)

Penelitian ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji langsung dinamika pemerintahan desa dalam konteks pengelolaan aset, khususnya alih fungsi fasilitas publik. Selain menjadi kontribusi ilmiah, penelitian ini dapat dijadikan model studi lapangan untuk memahami kompleksitas kebijakan lokal, praktik partisipatif, serta pendekatan berbasis kearifan lokal yang relevan dalam konteks pemerintahan dan pembangunan desa, serta dapat digunakan sebagai pijakan dan referensi kepada penelitian selanjutnya

c. Bagi Universitas

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam prodi Ilmu Pemerintahan. Memberikan peran penting dalam mendorong inovasi serta Universitas dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan ajar, referensi, dan sumber kajian kebijakan lokal, serta sebagai bentuk nyata dari pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan akademis dan kolaboratif.

1.5 Penegasan Istilah

1. Dinamika Pengembangan Museum Budaya

Dinamika Pengembangan Museum Budaya dalam penelitian ini dimaknai sebagai rangkaian proses yang terus bergerak dan mengalami perubahan dalam pengelolaan serta pemanfaatan museum budaya di Desa Bedingen, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembaruan strategi pengembangan. Proses tersebut meliputi pengadaan dan

pelestarian koleksi budaya, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penataan ruang pamer, pengemasan informasi dan edukasi budaya, penguatan manajemen kelembagaan, promosi, serta pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh upaya ini diarahkan agar museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda budaya, tetapi juga sebagai pusat edukasi, identitas budaya, dan daya tarik wisata yang mampu menunjang pertumbuhan pariwisata desa secara berkelanjutan.(Satmoko & Sari 2024).

Dalam konteks dinamika, pengembangan museum budaya juga dipahami sebagai proses adaptif yang menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan pariwisata, serta kebijakan pemerintah. Museum dituntut untuk mampu berinovasi dalam penyajian koleksi, pemanfaatan teknologi informasi, penyelenggaraan kegiatan budaya, serta peningkatan kualitas layanan bagi pengunjung. Dengan demikian, museum tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang agar tetap relevan, menarik, dan mampu memberikan pengalaman edukatif sekaligus rekreatif bagi wisatawan.

Selain itu, dinamika pengembangan museum budaya juga mencakup hubungan timbal balik antara museum dan masyarakat desa. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam pengelolaan, pelestarian, serta pemanfaatan potensi budaya lokal. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan museum, memperkuat identitas budaya, serta mendorong terciptanya manfaat ekonomi melalui kegiatan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan museum budaya tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan dan koleksi, tetapi juga pada penguatan sosial, budaya, dan ekonomi desa. (Gunarsa et al. 2025).

2. Pariwisata Desa

Pariwisata Desa dalam penelitian ini dimaknai sebagai seluruh aktivitas kepariwisataan yang berkembang di wilayah pedesaan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa, baik berupa sumber daya alam, budaya, maupun kehidupan sosial masyarakat, yang dikelola secara

partisipatif dan berkelanjutan. Pariwisata desa tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa (Purnomo & Wulandari 2017).

Dalam konteks Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, pariwisata desa dipahami sebagai upaya menjadikan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata yang memiliki nilai edukatif dan rekreatif. Keberadaan museum budaya menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pariwisata desa karena berfungsi sebagai pusat informasi, pelestarian, dan promosi identitas budaya desa. Dengan adanya museum, wisatawan tidak hanya menikmati objek wisata, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Selain itu, pariwisata desa juga mencakup pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, promosi, serta keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah desa, pengelola, pelaku UMKM, dan masyarakat. Sinergi antar unsur tersebut diperlukan agar pariwisata desa dapat berkembang secara berkelanjutan, tidak merusak nilai budaya, serta mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Bedingin. Dengan demikian, pariwisata desa dalam penelitian ini diposisikan sebagai sarana pembangunan desa berbasis budaya yang terintegrasi dengan pengembangan museum budaya.

3. Museum Desa

Museum adalah institusi permanen yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pelestarian, pengkajian, dan penyebarluasan pengetahuan mengenai warisan budaya dan alam, baik yang bersifat material maupun immaterial . Menurut *International Council of Museums* (ICOM), museum merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan (non-profit), bersifat terbuka untuk umum, dan memiliki tanggung jawab sosial untuk mengedukasi, menginspirasi, serta melibatkan masyarakat dalam memahami sejarah, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya (Ardiansyah et al. 2024). Museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan artefak

atau benda bersejarah, tetapi juga sebagai ruang interaktif yang menghubungkan nilai-nilai masa lalu dengan kehidupan masa kini serta menjadi referensi pembelajaran bagi generasi yang akan datang.

Dalam konteks Masyarakat desa, museum memiliki makna yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Museum desa tidak harus berukuran besar atau mewah, melainkan berfungsi sebagai sarana pelestarian identitas lokal, penguatan memori kolektif, serta pembelejaran lintas generasi. Museum Marjaya Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, menjadi contoh pemanfaatan aset desa yang sebelumnya berupa bangunan sekolah dasar yang dialihfungsikan menjadi ruang publik bernilai sejarah dan budaya. Museum ini tidak hanya menampilkan koleksi benda peninggalan masa lalu, tetapi juga merekam perjalanan sosial dan pengalaman hidup masyarakat setempat. Kehadiran museum di tingkat desa sekaligus mencerminkan praktik pembangunan yang bertumpu pada kearifan lokal. Dengan mengedepankan partisipasi warga, museum dapat menjadi alat transformasi sosial yang mendorong penguatan identitas budaya, pelestarian warisan leluhur, hingga peningkatan potensi ekonomi berbasis wisata budaya. Selain itu, museum desa juga berfungsi sebagai sarana edukatif yang dapat meningkatkan literasi sejarah lokal di kalangan anak muda dan pelajar desa.

1.6 Literature Review

Untuk menambah referensi dalam penelitian ini dan membandingkan masalah terkait, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang dikutip yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian pertama, yang berjudul “Identifikasi Penerapan Konsep Transformasi Tipologi Bangunan Museum Sejarah Kota Bandung”. Yang ditulis oleh (Setiawan et al. 2023). Penelitian ini dilakukan di Museum Sejarah Kota Bandung yang dulunya merupakan bangunan *Frobel School* yang dibangun pada tahun 1890. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep pada bangunan bersejarah serta menganalisis perubahan tata ruang yang terjadi seiring dengan peralihan fungsinya menjadi museum. Pendekatan yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pada bangunan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, di mana penyesuaian fungsi dilakukan tanpa menghilangkan nilai historis, karakter arsitektural, maupun makna budaya yang melekat pada bangunan aslinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menjadi strategi yang efektif dalam pelestarian bangunan bersejarah sekaligus menjawab kebutuhan ruang publik masa kini secara berkelanjutan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Humaidy, Dewi, & Muftiadi 2022) dengan judul “Strategi Revitalisasi Gedung Juang dengan Konsep *Pengembangan* Menjadi Museum Pemerintah Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merancang strategi revitalisasi Gedung Juang, sebuah bangunan peninggalan kolonial di Banda Aceh, agar dapat dialihfungsikan menjadi museum pemerintah kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan serta wawancara terstruktur yang melibatkan Masyarakat dan pihak yang memiliki kompetensi di bidang arsitektur dan pelestarian bangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan konsep adaptive reuse mampu mengoptimalkan kembali bangunan yang sebelumnya tidak termanfaatkan, tanpa mengabaikan nilai historis, karakter arsitektural, maupun konteks budaya setempat. Pemanfaatan teori Almahdar yang menitikberatkan pada prinsip keaslian, kemampuan beradaptasi, dan fleksibilitas ruang turut memperkuat keberhasilan proses alih fungsi, sehingga perubahan yang dilakukan tidak menghilangkan identitas utama bangunan. Studi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan aset publik melalui perencanaan yang matang dan pemanfaatan berbasis pelestarian. Lokasi penelitian ini berada di Gedung Juang, Kota Banda Aceh, dan secara keseluruhan memberikan kontribusi penting terhadap wacana *adaptive reuse* di Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan aset bersejarah milik pemerintah.

Selain itu penelitian oleh (Rahayu & Syagita Elly 2023) berjudul “Penerapan Metode Pengembangan Museum pada Bangunan Cagar Budaya:

Gedung Filateli Jakarta Pusat" berfokus pada pemanfaatan kembali bangunan bersejarah melalui pendekatan *adaptive reuse*. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep adaptive reuse pada bangunan cagar budaya agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal pada masa sekarang tanpa mengurangi nilai kesejerahananya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan dilaksanakan pada Gedung Filateli di Jakarta Pusat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *adaptive reuse* mampu menjaga keberlanjutan bangunan bersejarah melalui pemberian fungsi baru yang selaras dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, mosalnya sebagai pusat aktivitas budaya maupun ruang usaha, sehingga eksistensi bangunan tetap terpelihara sekaligus bernilai guna .Temuan ini menunjukkan bahwa pelestarian melalui adaptasi fungsional merupakan solusi efektif untuk menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan produktivitas aset publik.

Penelitian lain yang juga relevan dalam konteks alih fungsi fasilitas publik yakni dilakukan oleh (Haristianti, Andrianawati, and Resmadi 2022) dengan judul “Transformasi Spasial Fisik dan Teritorial pada Bangunan Cagar Budaya: Studi Kasus Museum Gedung Sate, Bandung”. Penelitian ini mengkaji perubahan fisik dan wilayah ruang yang terjadi pada bangunan cagar budaya Gedung Sate setelah dialihfungsikan menjadi museum. Tujuan kajian ini adalah menguraikan bentuk-bentuk transformasi spasial yang berlangsung, baik pada aspek struktur bangunan maupun pergeseran fungsi ruang, serta menilai dampaknya terhadap karakter arsitektur yang harus tetap dilindungi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan melalui pengamatan lapangan, observasi langsung, serta penelaahan dokumen dan gambar teknis guna menelusuri perkembangan fungsi dan konfigurasi ruang dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses alih fungsi Gedung Sate menjadi museum mengalami adaptasi fisik dan penyesuaian ruang agar selaras dengan kebutuhan fungsional modern, namun tetap menjaga nilai historis dan simbolis bangunan tersebut sebagai warisan budaya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Penelitian selanjutnya yang relevan yakni dilakukan oleh (Fanaya, Septanti, & Novianto 2025). Yang berjudul “Transformasi Ruang Bersejarah

melalui Konsep *Adaptive Reuse* di De Tjolomadoe Surakarta". Penelitian ini mengulas penerapan konsep *adaptive reuse* pada bangunan bersejarah bekas Pabrik Gula Colomadu yang saat ini dikenal sebagai De Tjolomadoe di Kabupaten Karanganyar, Surakarta. Kajian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana proses pemanfaatan kembali bangunan industry peninggalan colonial dapat dilakukan tanpa mengurangi nilai historis yang melekat di dalamnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif, di mana data diperoleh melalui talaah Pustaka, pengamatan langsung di lokasi, serta pengumpulan dokumentasi visual dan arsip bangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan fungsi di De Tjolomadoe mampu mengubah Kawasan tersebut menjadi ruang publik yang bersifat multifungsi, seperti museum, ruang pertunjukan, dan area komersial, sekaligus tetap menjaga karakter arsitektur asli bangunan. Hasil kajian ini menegaskan bahwa konsep *adaptive reuse* dapat menjadi strategi pelestarian yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai warisan budaya dan kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan studi ini dilakukan oleh (Irwandi, Andrizal, & Putra 2019) yang mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa. Penelitian tersebut bertujuan untuk menelaah bagaimana kebijakan pengelolaan aset diterapkan di tingkat desa, sakaligus menilai tingkat efektivitasnya serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan aparatur desa, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen kebijakan pada sejumlah desa di Kabupaten Muoro Jambi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem administrasi dan pendataan aset, serta rendahnya keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun demikian, terdapat pula praktik-praktik baik di beberapa desa yang telah menyusun kebijakan pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparat desa serta

pendampingan regulatif untuk mewujudkan tata kelola aset yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Profesionalisme, dan Optimalisasi Aset Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)” oleh (Sri Damayanti Wulandari & Astri Furqani 2022). Artikel tersebut bertujuan untuk mengkaji kontribusi partisipasi Masyarakat, profesionalisme aparatur desa, serta pengelolaan aset desa yang efektif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa dan tokoh Masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variable, yaitu partisipasi Masyarakat, tingkat profesionalisme aparatur, dan optimalisasi pemanfaatan aset desa, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PADes. Temuan ini memperkuat pentingnya tata kelola yang partisipatif dan profesional, serta pengelolaan aset desa yang maksimal dalam mendorong kemandirian fiskal desa. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan pengelolaan aset berbasis partisipatif di tingkat desa.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh (Tama and Lanin 2025) dengan judul penelitiannya yakni “Museum Buya Hamka sebagai Destinasi Pariwisata Edukasi Kabupaten Agam.” Penelitian ini mengkaji pengelolaan Museum Buya Hamka sebagai daya tarik wisata edukatif berbasis sejarah dan budaya lokal. Tujuannya menganalisis bagaimana museum berfungsi sebagai sarana pelestarian sekaligus penunjang pariwisata daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa museum telah menjalankan fungsi edukatif, namun pengembangannya belum optimal karena keterbatasan promosi, aksesibilitas, kapasitas SDM, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa pengembangan museum memerlukan penguatan manajemen, SDM, dan keterlibatan komunitas agar mampu menunjang pariwisata secara berkelanjutan.

Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh (Wisata, Di, and Aan 2024) dalam artikel yang berjudul “Kajian Daya Tarik Museum Sukanta Wahyu sebagai Wisata Budaya di Desa Aan, Klungkung.” Penelitian ini mengkaji potensi Museum Sukanta Wahyu sebagai daya tarik wisata budaya di desa wisata. Tujuannya untuk menganalisis sejauh mana museum mampu menunjang pariwisata melalui komponen kepariwisataan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teori komponen pariwisata 4A (*attraction, amenities, accessibility, ancillary*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Museum Sukanta Wahyu memiliki kekuatan utama pada aspek *attraction* melalui koleksi seni berciri khas budaya Bali, serta telah memenuhi aspek *accessibility* dan *ancillary*, namun masih lemah pada aspek *amenities*. Kajian ini menegaskan bahwa pengembangan museum di desa perlu didukung oleh peningkatan fasilitas, pengelolaan, dan strategi pengembangan agar mampu berfungsi optimal sebagai penunjang pariwisata desa.

Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh (Batubara and Maulida 2024) dalam artikel yang berjudul “Peran Museum dalam Pelestarian Sejarah dan Budaya Masyarakat”. Penelitian ini mengkaji peran museum tidak hanya sebagai tempat penyimpanan artefak, tetapi sebagai pusat edukasi dan daya tarik wisata budaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari buku, artikel, dan sumber daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa museum berfungsi sebagai ruang pembelajaran aktif yang mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan nilai pariwisata edukatif. Museum juga dituntut beradaptasi dengan teknologi dan pengemasan pameran yang menarik agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan museum memiliki kontribusi strategis dalam pelestarian budaya sekaligus penguatan sektor pariwisata lokal.

Selanjutnya penelitian terakhir yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh (Susantri and Rizvi 2025) dengan artikel yang berjudul “Museum Adityawarman sebagai Media Edukasi dan Pelestarian Budaya Lokal”. Penelitian ini mengkaji peran Museum Adityawarman di Sumatera

Barat sebagai sarana edukasi sekaligus pelestarian budaya Minangkabau. Metode yang digunakan adalah survei, observasi langsung, dan wawancara dengan pengelola museum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Museum Adityawarman memiliki koleksi etnografi, historika, arkeologika, dan seni budaya yang beragam serta didukung bangunan bergaya rumah gadang sebagai identitas lokal. Museum ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran kontekstual bagi masyarakat dan mahasiswa. Temuan ini menegaskan bahwa museum berperan strategis dalam mendukung pariwisata budaya dan pelestarian nilai lokal melalui pemanfaatan aset publik secara edukatif dan berkelanjutan.

1.7 Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Pengembangan oleh Amartya Sen (1999) dan Teori Pembangunan oleh Michael P. Todaro (1989).

1. Teori Pengembangan oleh Amartya Sen (1999)

Dalam penelitian ini digunakan Teori Pengembangan sebagai landasan analisis untuk melihat dinamika pengembangan museum budaya dalam menunjang pariwisata desa. Salah satu landasan utama teori pengembangan dikemukakan oleh Amartya Sen (1999) melalui konsep *Development as Freedom*. Sen memandang pengembangan sebagai proses perluasan kebebasan manusia (*expansion of human capabilities*), yaitu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan pilihan hidupnya. Pengembangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, informasi, partisipasi sosial, serta kesempatan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Dalam konteks desa, pengembangan menurut Sen berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan museum budaya bukan hanya pembangunan bangunan atau koleksi, tetapi juga sarana memperluas kapasitas masyarakat desa dalam memahami, melestarikan, dan memanfaatkan warisan budaya sebagai sumber pengetahuan dan ekonomi.

Dengan demikian, museum menjadi ruang yang mendorong kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas pariwisata dan pembangunan desa. Selanjutnya, Siagian (2012) menjelaskan bahwa pengembangan merupakan usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan, baik teknis, konseptual, maupun moral dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengembangan tidak hanya menekankan pada aspek fisik, tetapi juga mencakup peningkatan manajemen, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan. Pengembangan museum budaya berarti melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada aspek sarana prasarana, pengelolaan koleksi, tata pamer, serta kualitas pelayanan kepada pengunjung.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hasibuan (2016) yang menyatakan bahwa pengembangan adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar individu maupun lembaga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam konteks kelembagaan, pengembangan berarti upaya memperbaiki fungsi organisasi agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengembangan museum budaya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas pengelola, promosi, inovasi layanan, serta pelibatan masyarakat desa.

Dalam bidang pariwisata, konsep pengembangan juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas destinasi. Suwantoro (2004) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas serta pelayanan guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Sementara itu, Yoeti (2008) menekankan bahwa pengembangan pariwisata mencakup perencanaan, pengelolaan daya tarik, aksesibilitas, amenitas, serta aktivitas wisata yang dilakukan secara terpadu. Dengan demikian, pengembangan museum budaya diarahkan agar museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda budaya, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan daya tarik wisata yang mampu memberikan pengalaman bermakna bagi pengunjung.

Dalam teori pengembangan, pengembangan dipahami sebagai proses peningkatan kualitas suatu objek atau sistem secara terencana dan berkelanjutan. Mengacu pada konsep pengembangan menurut Amartya Sen (1999) tentang perluasan kapasitas (*capability approach*), serta diperkaya dengan pandangan Siagian (2012), Hasibuan (2016), dan Suwantoro (2004), pengembangan museum budaya dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa dimensi utama sebagai indikator keberhasilan pengembangan. Dimensi-dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana museum budaya mampu berkembang dan berkontribusi dalam menunjang pariwisata desa.

a. *Physical* (Fisik)

Dimensi fisik merujuk pada kondisi sarana dan prasarana museum budaya secara keseluruhan. Aspek ini mencakup bangunan museum, ruang pamer, tata letak koleksi, fasilitas pendukung, kebersihan, kenyamanan, serta aksesibilitas bagi pengunjung. Semakin baik kondisi fisik museum, maka semakin besar pula daya tarik yang dimiliki museum sebagai destinasi wisata. Penilaian fisik menjadi penting karena kondisi bangunan dan fasilitas merupakan kesan awal yang diterima pengunjung. Museum yang tertata, aman, dan nyaman akan mendorong wisatawan untuk berkunjung lebih lama serta meningkatkan minat kunjungan ulang. Dalam konteks pengembangan, perbaikan fisik tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga fungsional agar museum mampu menjalankan peran edukatif dan rekreatif secara optimal (Rahayu & Syagita Elly 2023).

b. *Management* (Manajemen Pengelolaan)

Dimensi manajemen berkaitan dengan sistem pengelolaan museum budaya, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Aspek ini mencakup struktur organisasi, pembagian tugas, profesionalitas pengelola, serta mekanisme kerja yang diterapkan dalam operasional museum. Manajemen yang baik akan menentukan keberlangsungan pengembangan museum. Tanpa pengelolaan yang terencana, pengembangan fisik tidak akan berjalan

efektif. Oleh karena itu, pengembangan museum harus disertai dengan peningkatan kapasitas pengelola, transparansi kerja, serta koordinasi antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat.

c. *Human Resources* (Sumber Daya Manusia)

Dimensi sumber daya manusia mengacu pada kualitas dan kemampuan pengelola museum, pemandu, serta masyarakat yang terlibat. Aspek ini mencakup pengetahuan tentang budaya lokal, keterampilan pelayanan, komunikasi, serta kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Pengembangan museum budaya tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai penggeraknya. Sumber Daya Manusia yang kompeten akan mampu mengemas informasi budaya dengan baik, memberikan pelayanan yang ramah, serta menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam dinamika pengembangan museum budaya.

d. *Community Participation* (Partisipasi Masyarakat)

Dimensi partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan warga desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan museum budaya. Partisipasi dapat berupa kontribusi ide, tenaga, pelestarian budaya, hingga pengembangan usaha ekonomi kreatif di sekitar museum. Pengembangan museum budaya yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Dengan adanya partisipasi, museum tidak hanya menjadi milik pengelola, tetapi menjadi aset bersama desa yang mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

2. Teori Pembangunan oleh Michael P. Todaro (1989)

Dalam teori pembangunan yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro (1989), pembangunan dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, serta kelembagaan nasional, di samping percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan. Todaro menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya

berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perbaikan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Todaro menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga nilai pokok, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*), peningkatan harga diri manusia (*self-esteem*), dan perluasan kebebasan memilih (*freedom from servitude*). Pemenuhan kebutuhan dasar mencakup kecukupan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan harga diri manusia berkaitan dengan martabat dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan perluasan kebebasan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan hidup dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dalam pandangan Todaro, pembangunan juga harus mampu mendorong perubahan sosial yang positif, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial dan budaya, karena keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat serta kesesuaian program pembangunan dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, pembangunan tidak semata-mata bersifat fisik atau ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan.

Dalam konteks pengembangan museum budaya guna menunjang pariwisata desa, teori Todaro memberikan kerangka untuk melihat museum sebagai bagian dari proses pembangunan desa. Museum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, serta penguatan identitas sosial dan budaya. Melalui pengembangan museum budaya, masyarakat Desa Bedingin diharapkan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, pengetahuan budaya, serta ruang partisipasi dalam pembangunan pariwisata desa.

Dalam teori pembangunan yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro (1989), pembangunan dipahami sebagai proses peningkatan kualitas hidup manusia yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial dan perluasan kebebasan

masyarakat. Todaro menekankan tiga nilai inti dalam pembangunan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*), peningkatan harga diri manusia (*self-esteem*), serta perluasan kebebasan dan partisipasi (*freedom and participation*). Ketiga nilai tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah.

a. *Basic Needs* (Pemenuhan Kebutuhan Dasar)

Pemenuhan kebutuhan dasar dalam konteks Todaro merujuk pada terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, seperti pendidikan, informasi, pekerjaan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam kaitannya dengan pengembangan museum budaya, indikator ini dilihat dari sejauh mana keberadaan museum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, maupun akses pembelajaran tentang budaya dan pariwisata. Museum budaya tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan ekonomi. Semakin besar kontribusi museum terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka semakin kuat pula perannya sebagai instrumen pembangunan desa.

b. *Human Self-Esteem* (Harga Diri Manusia)

Harga diri manusia menurut Todaro berkaitan dengan martabat, kepercayaan diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap identitasnya. Dalam penelitian ini, indikator harga diri manusia dilihat dari tumbuhnya rasa bangga masyarakat terhadap budaya lokal, meningkatnya kesadaran pelestarian warisan budaya, serta penguatan identitas Desa Bedingin melalui keberadaan museum budaya. Pengembangan museum budaya diharapkan mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dan sejarah desa. Dengan demikian, museum tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi sosial dan budaya masyarakat di tengah perkembangan pariwisata.

c. *Freedom and Participation* (Kebebasan dan Partisipasi)

Kebebasan dan partisipasi dalam teori Todaro mengacu pada kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan menentukan pilihan hidupnya. Indikator ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan museum budaya, serta ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dalam pengembangan pariwisata desa. Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan melibatkan warga sebagai subjek pembangunan. Semakin besar partisipasi masyarakat dalam pengembangan museum budaya, maka semakin berkelanjutan pula pembangunan pariwisata desa yang dijalankan.

1.8 Definisi Operasional

Operasional juga dapat didefinisikan sebagai arahan untuk melakukan kegiatan atau penggerjaan Penelitian dan merupakan ide yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran variabel yang relevan serta penembangan instrument (alat ukur).

1. *Physical* (Fisik)

Physical (Fisik) dalam konteks *adaptive reuse* merujuk pada penilaian menyeluruh terhadap kondisi bangunan secara fisik, yang mencakup struktur utama, material bangunan, sistem utilitas, dan kualitas konstruksi secara keseluruhan. Semakin baik kondisi fisik suatu bangunan, maka semakin besar pula potensi bangunan tersebut untuk dialihfungsikan tanpa memerlukan intervensi renovasi besar yang memakan biaya dan waktu.

Dalam kasus Museum Marjaya di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, bangunan yang kini dijadikan museum sebelumnya merupakan bangunan Sekolah Dasar (SD) yang telah tidak difungsikan lagi karena kekurangan peserta didik. Meskipun tidak lagi aktif digunakan sebagai lembaga pendidikan, kondisi fisik bangunan tersebut masih relatif baik dan terjaga, dengan struktur bangunan permanen yang masih layak secara teknis. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama Pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan alih fungsi. Daripada membiarkan aset desa

tersebut terbengkalai dan rusak seiring waktu, pemanfaatannya sebagai museum menjadi pilihan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kelayakan fisik bangunan SD ini memungkinkan transformasi fungsional menjadi museum dilakukan dengan biaya renovasi minimal, namun tetap memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Ruang-ruang kelas yang luas dapat disesuaikan menjadi ruang pameran, ruang arsip, atau tempat edukasi komunitas. Dengan demikian, dimensi fisik dalam teori Pengembangan menjadi sangat relevan dalam menjelaskan dasar teknis dari keberhasilan kebijakan alih fungsi bangunan ini.

2. *Management System* (Manajemen Pengelolaan)

Manajemen pengelolaan merupakan indikator yang menunjukkan bagaimana museum budaya direncakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam menunjang pariwisata desa. Manajemen ini mencakup pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas pengelola, pengelolaan koleksi, pelayanan pengunjung, serta koordinasi antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat. Dalam konteks Museum Marjaya di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, manajemen pengelolaan dilihat dari sejauh mana sistem kerja diterapkan secara terencana dan partisipatif sehingga museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelestarian budaya, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan daya tarik wisata yang berkelanjutan..

3. *Human Resources* (Sumber Daya Manusia)

Human Resources atau sumber daya manusia merupakan indikator yang menunjukkan kualitas dan peran orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan museum budaya. Aspek ini mencakup kemampuan, pengetahuan tentang budaya lokal, keterampilan pelayanan, komunikasi, serta sikap profesional pengelola dan masyarakat yang terlibat. Dalam konteks Museum Marjaya di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, sumber daya manusia dilihat dari sejauh mana pengelola dan warga mampu menjalankan fungsi museum secara optimal, memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung, serta berperan aktif dalam pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata desa secara berkelanjutan.

4. *Community Participation* (Partisipasi Masyarakat)

Community participation atau partisipasi masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan keterlibatan warga desa dalam proses pengembangan museum budaya, baik pada tahap perencanaan, pengelolaan, maupun pemanfaatannya. Partisipasi ini mencakup kontribusi ide, tenaga, pelestarian budaya, serta keterlibatan dalam kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan museum. Dalam konteks Museum Marjaya di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, partisipasi masyarakat dilihat dari sejauh mana warga berperan sebagai subjek pembangunan, ikut menjaga keberlanjutan museum, serta memperoleh manfaat sosial dan ekonomi dari pengembangan museum budaya sebagai penunjang pariwisata desa.

5. *Basic Needs* (Pemenuhan Kebutuhan Dasar)

Basic needs atau pemenuhan kebutuhan dasar merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan museum budaya mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat desa. Aspek ini mencakup dukungan terhadap peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, akses edukasi dan informasi budaya, serta peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas pariwisata desa. Dalam konteks Museum Marjaya di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, pemenuhan kebutuhan dasar dilihat dari bagaimana keberadaan museum berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, baik melalui aktivitas ekonomi, pembelajaran budaya, maupun penguatan kapasitas masyarakat dalam menunjang pariwisata desa secara berkelanjutan.

6. *Human Self-Esteem* (Harga Diri Manusia)

Human self-esteem atau harga diri manusia merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan martabat, kepercayaan diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap identitas serta budaya lokalnya. Aspek ini mencakup tumbuhnya rasa memiliki terhadap museum, meningkatnya kesadaran pelestarian warisan budaya, serta penguatan citra Desa Bedingin melalui keberadaan museum budaya. Dalam konteks Museum Marjaya di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, harga diri manusia dilihat dari sejauh mana masyarakat merasa dihargai, bangga terhadap budayanya, dan terdorong untuk menjaga serta mengembangkan museum sebagai simbol

identitas budaya yang menunjang pariwisata desa.(Raco, Tondobala, and M. Rompas 2015).

7. *Freedom and Participation* (Kebebasan dan Partisipasi)

Freedom and participation atau kebebasan dan partisipasi merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki ruang dan kesempatan untuk terlibat serta menentukan peran dalam pengembangan museum budaya. Aspek ini mencakup kebebasan menyampaikan aspirasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta partisipasi aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan museum. Dalam konteks Museum Marjaya di Desa Bedingin Kecamatan Sambit, indikator ini dilihat dari bagaimana masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan, memiliki akses untuk berkontribusi, dan memperoleh manfaat dari pengembangan museum budaya sebagai penunjang pariwisata desa secara berkelanjutan.

1.9 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menilai bagaimana dinamika pengembangan museum melalui pendekatan teori pengembangan dan teori pembangunan (Fathir et al. 2024). Dengan pendekatan studi kasus, metode penelitian kualitatif yaitu sebagai penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, penikiran orang secara individu ataupun kelompok penelitian kualitatif bertumpu pada pemahaman bahwa manusia merupakan alat instrument utama atau yang disebut dengan human intrumen.

Oleh karena itu peneliti dianggap sebagai salah satu partisipan observation sebab peneliti sebagai alat dalam mencari dan mengumpulkan data. Karena ketika seorang peneliti masuk kelapangan dalam mengumpulkan data peneliti masuk kelapangan dalam mengumpulkan data peneliti benar-benar harus dapat berperan serta. Penelitian kualitatif pada intinya menggunakan paradigma terutama dalam penarikan Kesimpulan

dilakukan secara induktif. Selain menggambarkan kondisi lapangan, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah kebijakan yang telah diterapkan dalam konteks tata ruang dan pemanfaatan aset desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, historis, dan regulatif yang melingkupi perubahan fungsi ruang publik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemanfaatan ruang secara adaptif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bedingin, yang terletak di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Bedingin dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sejumlah fasilitas publik yang mengalami perubahan fungsi, baik yang direncanakan maupun yang berlangsung secara alami akibat perubahan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadikan Desa Bedingin relevan sebagai studi kasus dalam menganalisis potensi dinamika pengembangan museum serta menelaah kebijakan lokal yang mengatur atau mempengaruhi proses alih fungsi tersebut. Selain itu, desa ini memiliki struktur sosial dan tata ruang yang mencerminkan dinamika pemanfaatan aset desa yang khas di wilayah perdesaan, sehingga dapat memberikan gambaran kontekstual yang kaya untuk kebutuhan penelitian.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran langsung dalam proses alih fungsi fasilitas publik. Kriteria penentu sampel dalam penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

- 2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- 3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini yakni, kepala desa Bedingin, Perangkat Desa Bedingin, tokoh masyarakat serta pengelola museum.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap topik atau permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, informan berperan penting sebagai sumber utama data, karena mereka mampu memberikan informasi yang mendalam, kontekstual, dan relevan berdasarkan perspektif atau keterlibatan pribadinya.

Informan penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses alih fungsi fasilitas publik. Keberadaan Informan menjadi kunci utama untuk memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan realitas lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif, baik secara kualitatif maupun kontekstual.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari narasumber yang memiliki peran atau pengetahuan langsung terhadap proses kebijakan alih fungsi. Informan terdiri dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengelola fasilitas publik, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan alih fungsi. Wawancara bertujuan untuk memahami latar belakang kebijakan, persepsi masyarakat, serta aspek-aspek yang

menjadi pertimbangan dalam mengadaptasi bangunan lama ke fungsi baru.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian berupa bangunan publik yang dialihfungsikan. Peneliti mencermati kondisi fisik bangunan, lingkungan sekitar, serta dinamika pemanfaatan ruang setelah perubahan fungsi. Observasi ini berguna untuk menilai kesesuaian antara kebijakan alih fungsi dengan kondisi aktual bangunan, serta menilai potensi *adaptive reuse* berdasarkan enam indikator utama: nilai sejarah, kondisi fisik, lokasi, permintaan pasar, regulasi, dan kelayakan finansial.

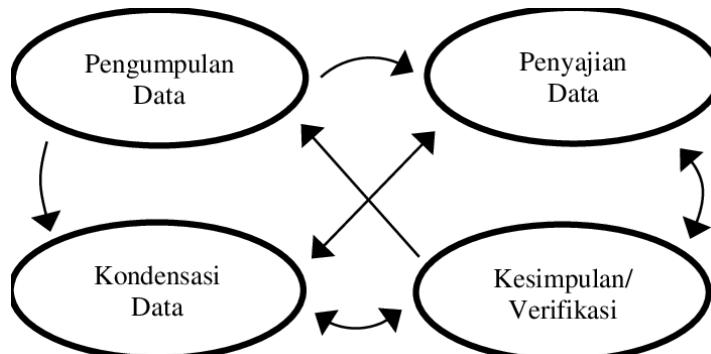
c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi dengan bukti tertulis maupun visual. Dokumen yang dikumpulkan meliputi arsip desa, regulasi kebijakan, foto-foto bangunan, data perencanaan, serta dokumen administrasi pengelolaan aset desa. Data dokumentatif ini membantu memperkuat validitas dan keakuratan hasil penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan, sejarah, peristiwa, serta perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini dokumentasi dapat dijadikan sebagai bukti pendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Model ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk terus melakukan proses analisis secara sistematis, simultan, dan mendalam selama proses pengumpulan data berlangsung hingga setelah data terkumpul.

Gambar 1.1. Skema Proses Data



Sumber : (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Model ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk terus melakukan proses analisis secara sistematis, simultan, dan mendalam selama proses pengumpulan data berlangsung hingga setelah data terkumpul. (Huberman, Miles, and Saldana 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses untuk menyederhanakan, memfokuskan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini. Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, menghilangkan informasi yang tidak diperlukan, serta mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu. Kondensasi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk menyaring, memilah, memusatkan, menggabungkan, dan mengatur data agar memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Data kualitatif dapat diolah dengan berbagai metode, seperti seleksi, pringkasan atau paraphrase, juga masuk kedalam pola yang lebih luas. Kesimpulannya, setelah penlitri mengumpulkan data tertulis dan

wawancara di lapangan, kondensasi data dilakukan. Selanjutnya, teks wawancara dipilah untuk menentukan topik penelitian yang ingin dilakukan peneliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses menyusun hasil kondensasi ke dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami serta menafsirkan informasi yang diperoleh. Data yang telah disusun dapat ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, grafik, bagan alur, atau jaringan hubungan antar kategori (Ash-shiddiqi, Sinaga, and Audina 2025). Tujuan penyajian data adalah untuk menampilkan pola, kecenderungan, atau hubungan antarkomponen data secara jelas. Melalui penyajian yang baik, peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan fenomena yang diteliti dan menelusuri arah analisis dengan lebih terarah.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana peneliti menginterpretasikan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan dapat berupa temuan baru, pola hubungan antarvariabel, maupun pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Namun, kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara, sehingga perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan keabsahannya. Verifikasi dilakukan melalui proses triangulasi, pengecekan ulang data, diskusi dengan rekan sejawat, dan konfirmasi kepada informan (member check). Dengan cara ini, kesimpulan akhir yang dihasilkan akan lebih valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sitasi.

7. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Validitas dalam pendekatan kualitatif tidak diukur dengan angka statistik, melainkan melalui pemeriksaan mendalam terhadap kebenaran dan kejujuran informasi yang disampaikan

oleh informan. Oleh karena itu, peneliti perlu menggunakan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap objek yang sama. Selain itu, peneliti juga melakukan pemeriksaan berulang terhadap hasil wawancara, dokumen pendukung, serta catatan lapangan. Proses ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian data dan menghindari bias interpretasi atau kesalahan persepsi dari peneliti.

Peneliti juga menerapkan teknik member check, yaitu mengonfirmasi kembali data atau interpretasi temuan kepada informan yang bersangkutan (Mekarisce 2020). Hal ini dilakukan agar setiap informasi yang disajikan benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh narasumber. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memperoleh hasil penelitian yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipercaya dalam menggambarkan dinamika pengembangan museum desa yang ada di Desa Bedingen.